

Research article

Tradisi *Kemaliq* dan *Perang Topat* sebagai Strategi Membangun Perdamaian yang Tangguh dan Replikatif di Indonesia

Kemaliq and Perang Topat Traditions as Recillient and Replicatable Peacebuilding Strategies in Indonesia

Jeko Spastyono^{1*}, Ichsan Malik², Bambang Wahyudi³, Pujo Widodo⁴

¹ Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Indonesia

² Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Indonesia

³ Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Indonesia

⁴ Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, Indonesia

* ejeko93@gmail.com

Abstract

Cultures may either flourish or decline based on different situations. Due to its dynamicity, utilizing cultural values as a foundation for peace or peacebuilding is generally deemed an unwise investment for governments. Nevertheless, in this study, we challenge this notion with unique cultural peace values exhibited by tradition of *Kemaliq* and *Perang Topat* in Lombok Island, Indonesia. By employing qualitative methods, we delve into the cultures and highlighting their exceptional qualities that differentiate them from other peace-making cultural efforts. We found distinctively that these traditions' greatest strengths lie in their primary activities of sharing of sacred sites between Islamic and Hindu adherents in *Kemaliq*, and the enthusiastic act of channeling all grievances into the thrown *topat* towards the opposing side in *Perang Topat*. With the peacemaking power of both lying on their material activities, rather than in abstract values that may be subject to change or erosion over time, making them durable, replicate-able, and dynamically usable peace cultures, much different than their counterparts. Accordingly, we highly recommend that, especially, the government of Indonesia to invest in promoting these traditions as valuable sources of local and even national peacemaking endeavors.

Keywords

Acculturation; Cultural Values; Peacebuilding; Promotion of Culture; Replication of Tradition.

Article history

Submitted: 09/06/2023; revised: 26/11/2023; accepted: 09/12/2023.



© 2023 by the author(s). Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Dunia yang damai adalah impian dari umat manusia, dan semua memiliki versi dunia yang damai versi mereka. Tiada versi yang lebih baik atau lebih buruk, karena peneliti yakin, dunia yang damai dapat dicapai melalui ribuan ataupun ratusan ribu cara yang pada akhirnya mencapai tujuan akhir yang sama. Salah satunya yang dicetuskan oleh Galtung (2018) dengan membagi damai menjadi dua level, damai negatif dengan tiada konflik terbuka, dan damai positif dengan tiada berbagai sumber konflik dan kekerasan. Untuk mencapai damai negatif, kita dapat menggunakan saran dari Lederach (2015) yaitu dengan menahan diri dari pertengkaran baik antar individu maupun antar negara, sehingga tiada konflik kekerasan di antara umat manusia.

Sedangkan untuk mencapai perdamaian positif, kita semua perlu mengeluarkan upaya dan pengorbanan lebih besar, dimana kita harus hidup damai secara mendasar dan terstruktur berdasarkan sistem sosial yang cinta akan perdamaian (Institute for Economics & Peace, 2022). Salah satunya bisa dicapai dengan membuat budaya damai mendominasi sistem sosial kita, sehingga budaya damai ini menjadi panduan hidup damai bagi kita semua dan menghapus segala sumber konflik di antara kita (Jeong, 2019).

Di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok, terdapat tradisi *Kemaliq* dan *Perang Topat* yang telah menjadi simbol perdamaian. Berbagi tempat ibadah dalam budaya atau tradisi *kemaliq* dan mengeluarkan berbagai kenegatifan dengan aktivitas *perang topat* adalah sumber kedamaian antara penganut agama Islam dan Hindu di Desa/Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Budiwanti, 2022). Telah banyak yang meneliti terkait budaya ini, seperti penelitian Suhadah, Mulyana, Yusup, & Sjafrirah (2022) yang menggunakan perspektif agama untuk menunjukkan harmoni dan toleransi antar umat beragama Islam dan Hindu di Desa Lingsar. Kemudian, penelitian dari Aryawati, Wirawan, & Wirata (2022) yang melihat dari perspektif komunikasi budaya yang menyoroti komunikasi antarbudaya sebagai pencipta perdamaian di desa tersebut. Ada pula yang telah mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam kedua budaya ini dari perspektif sejarah *Kemaliq* Lingsar, seperti yang dilakukan oleh Zidni, Suhupawati, Rahmawati, & Hadi (2021). Ada juga yang mencapai kesimpulan unik, seperti penelitian Yuniati (2023) yang mendapati bahwa *perang topat* adalah hasil dari moderasi agama yang berorientasi kepada komitmen nasionalis dari Suku Sasak yang beragama Islam dan Suku Bali yang beragama Hindu.

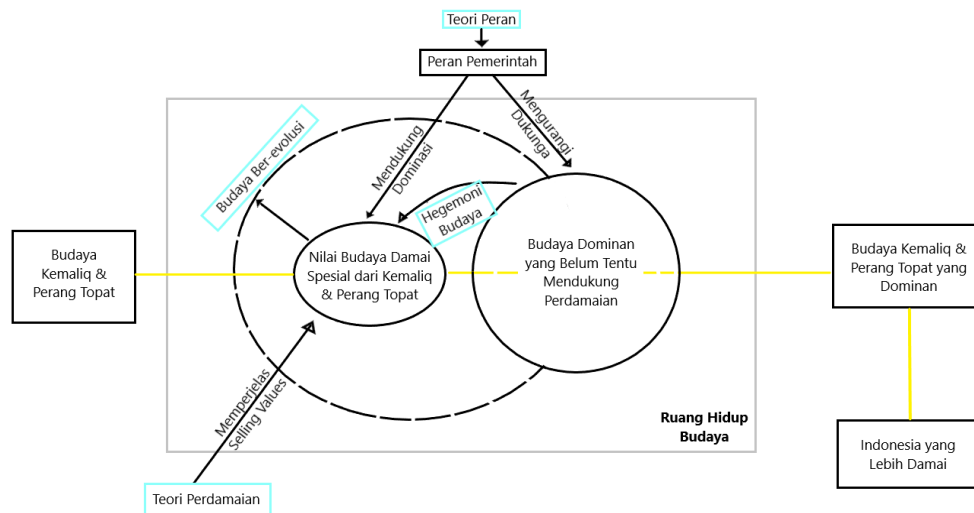
Meskipun telah banyak penelitian terkait budaya atau tradisi tersebut, tetapi belum ada penelitian yang mencoba mengupayakan keduanya menjadi budaya

dominan. Padahal seperti yang banyak telah disoroti tentang bagaimana budaya *kemaliq* telah membawa harmoni dan toleransi antar agama maupun antar budaya, dan tradisi *perang topat* yang menjadi penghilang keluh kesah antar kelompok, yang artinya keduanya memiliki nilai guna penting untuk menciptakan perdamaian.

Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan nilai damai yang dapat diterapkan dan direplikasi di luar Desa Lingsar. Hal ini akan didemonstrasikan melalui teori bahwa budaya dapat mengalami evolusi, meskipun harus berhadapan dengan dominasi budaya lain. Budaya *kemaliq* dan tradisi *perang topat* sebagai hasil replikasinya tetap dapat memperlihatkan berbagai nilai perdamaian yang khas. Terutama jika pemerintah aktif dalam mendukung kedua tradisi tersebut serta mendorongnya untuk mendominasi budaya-budaya lain di Lombok atau bahkan di tingkat nasional. Peneliti meyakini bahwa keduanya dapat menjadi sumber kekuatan perdamaian di Indonesia yang kaya akan keberagamannya, terutama dalam hal budaya dan agama.

2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang seberapa spesialnya nilai-nilai damai dari budaya kemaliq dan perang topat, menjawab pertanyaan tentang mengapa pemerintah harus membantu kedua budaya ini untuk mendominasi budaya lain, serta untuk menciptakan perdamaian Indonesia yang lebih kuat. Data diperoleh melalui wawancara tidak langsung pada program seminar universitas dengan para ahli dan profesional terkait masalah di NTB. Dalam analisis data, peneliti menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.



Gambar 1. Operasional Teori

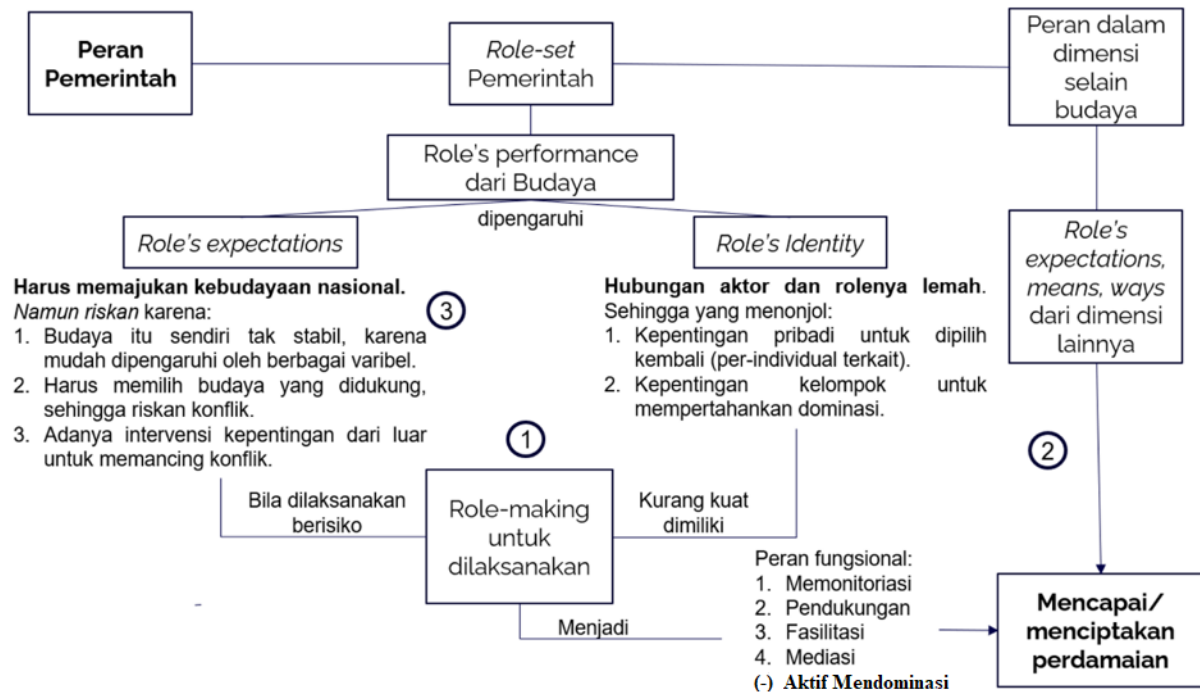
Peneliti kemudian menggunakan teori peran dari Cohen (1992) sebagaimana dalam Gambar 1 untuk menjelaskan peran budaya dan keterlibatannya dalam penciptaan perdamaian, terlebih bila budaya itu sejak awal memiliki nilai guna aplikatif untuk mewujudkan damai positif dari (Galtung, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Awal Pemerintah dalam Menciptakan Kondisi Damai

Meski memiliki regulasi terkait birokrasi dan sebagainya serta keterbatasan anggaran dan waktu untuk mengambil kebijakan aktif suatu konflik dan resolusi damai, peran dari pemerintah itu sendiri sangat holistik dan menyeluruh, yang menyangkut berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi peran pemerintah dalam mempromosikan budaya damai untuk menciptakan kondisi damai.

Namun, ada beberapa faktor yang lebih menonjol dari faktor-faktor lain terutama dalam penggunaan teori peran dari (Cohen, 1992) dan *means, ways, ends* dari (Lykke & F., 1997) untuk melihat pertimbangan pemerintah terkait penciptaan kondisi damai melalui budaya damai, seperti kemaliq dan perang topat. Di antaranya adalah keberadaan *role conflict* antara *roles expectation* yang diharapkan atas peran yang dimainkan dengan berbagai kepentingan dari *role's identity* yang dimiliki pemerintah, yang kurang lebih seperti yang terdapat dalam gambar berikut:



Gambar 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah

Sesuai dengan gambar 2 di atas, faktor pertama adalah terkait *role expectation* yang mengharapkan pemerintah untuk secara aktif memajukan dan mengembangkan budaya damai untuk mencapai kondisi damai melalui mekanisme pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang diperjelas pada UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Namun demikian, ada banyak risiko yang harus ditanggung pemerintah bila memilih untuk melaksanakan peran fungsionalnya sesuai *role expectation* yang dibebankan kepadanya. Baik itu risiko, karena budaya itu sendiri hidup dan berkembang (Creanza & Feldman, 2017), yang menjadikannya opsi yang kurang pasti untuk mencapai perdamaian. Ataupun berbagai risiko lain yang dapat dimanfaatkan oleh rival politik dengan membingkai bahwa pemerintah terpilih saat ini pilih kasih dengan hanya memajukan beberapa budaya dari beberapa kelompok.

Ditambah lagi dengan *role identity* atau persatuan antara sang aktor dengan *role* yang diperankan kurang kuat, dikarenakan berbagai kepentingan (individu dan kelompok yang ia wakili) yang membatasinya. Padahal *roles identity* adalah penyokong dari sang aktor untuk berani dan mau mengambil risiko untuk melaksanakan dan memenuhi *expected role* dari peran yang dimainkan. Maka, tentu peran yang diambil pemerintah tidak akan tepat sesuai *role expectations* yang diharapkan ataupun sesuai dengan *role identity* dari seorang pemerintah terpilih.

Faktor kedua, pada umumnya dalam proses mengambil keputusan dan kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan tiga hal *means* (sumber daya), *ways* (jalan atau

cara), dan *ends* (tujuan) dan dengan rumusan terbaik yang mereka yakini akan tercipta kebijakan terbaik (Meiser, 2016).

Jika dilihat pada pasal 1 ayat 6 UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, hampir tidak bisa menemukan kata damai, terkecuali pada pengulangan pembukaan UUD 1945 yang memiliki kata “perdamaian” yang dikutip dalam UU tersebut. Dan alasannya diperjelas pada pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang arti pemanfaatan, di mana jelas disebutkan bahwa pemanfaatan pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan adalah untuk menguatkan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Artinya, UU ini tidak menyarankan untuk digunakan guna menciptakan kondisi damai. Terlebih jika dilihat dari pemanfaatan budaya yang dijelaskan, (secara umum) diketahui kondisi damai sebagai *by-product* dari pemanfaatan budaya untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang disebutkan dalam pasal ini. Semua bidang atau dimensi ini adalah untuk mencapai tujuan nasional, dan tujuan nasional Indonesia salah satunya adalah perdamaian dunia, seperti yang jelas digambarkan dalam pembukaan UUD 1945.

Sehingga, sesuai UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa pandangan yang ada di pemerintahan (setidaknya tahun 2017) adalah budaya tidak dilihat sebagai *means* dan *ways* yang pemanfaatannya belum mendapatkan kepercayaan lebih untuk menciptakan damai (yang menjadi salah satu tujuan nasional), karena tidak disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan pemanfaatan budaya untuk mencapai tujuan nasional. Sebab ada banyak *means* dan *ways* lain (yang bahkan dapat dikuatkan melalui budaya) yang dapat menghasilkan produk utama lain yang menguntungkan sembari juga menghasilkan penciptaan kondisi damai sebagai *by-product*.

Faktor ketiga adalah keterbatasan yang membatasi keputusan pemerintah untuk memanfaatkan budaya sebagai pencipta perdamaian. Meskipun peran budaya damai, seperti baku bae jelas menjadi alat utama mendamaikan konflik Maluku (Muluk & Malik, 2009). Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa peran fungsional budaya itu sendiri tidak stabil dan terkadang budaya damai itu sendiri fungsinya menjadi minim dengan perubahan dinamika konflik wilayahnya. Sebagai contoh paling gamblang adalah bagaimana budaya dan prinsip *ASEAN's way*, yang menjadi sumber perdamaian ASEAN berubah menjadi penjara bagi ASEAN dalam berbagai rentetan kasus berdarah di Myanmar yang berakhir dengan runtuhnya pemerintah sah Myanmar ditangan junta militer (Yamahata, 2022; Sirijintana, 2022). Budaya yang layaknya

makhluk hidup sangatlah rentan terpengaruh ataupun terkontaminasi oleh budaya lain (Richerson & Boyd, 2008), ataupun karena perubahan dinamis kondisi, nilai damai dari budaya itu menjadi minim (Loh, 2018). Hingga akhirnya, pada rentan waktu yang panjang, budaya itu dapat menjadi budaya baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah dalam menciptakan perdamaian dan investasi pemerintah menjadi sia-sia.

Atas dasar ini tentu neraca pertimbangan dari pemerintah terpilih akan memilih menggelontorkan dana pada *means* dan *ways* untuk mencapai perdamaian yang jauh lebih pasti dan stabil daripada melalui promosi pengembangan budaya. Atau pun menggunakan budaya sewajarnya saja, sesuai perundangan untuk menguatkan dimensi lain dan menghasilkan kondisi damai sebagai *by-product*. Terlebih jelas dengan berbagai keuntungan (menciptakan kondisi damai), tanpa memiliki berbagai risiko sebagaimana ada pada gambar 2, yang dibutuhkan pemerintah terkait budaya (dan budaya damai) hanyalah untuk mencapai sebuah level kecukupan untuk menopang perdamaian yang ada (fungsi budaya pada kelompok sosial dan menangani konflik sosial), dan kekurangannya akan ditutupi oleh peran *means* dan *ways* lain yang lebih stabil.

3.2 Kemaliq dan Perang Topat yang Kaya Nilai Perdamaian

Budaya kemaliq dan perang topat adalah salah satu wujud pengejawantahan budaya damai terbaik yang dimiliki Lombok. Kedua tradisi ini dilaksanakan pada situs Kemaliq Lingsar, Lombok Barat, yang kental akan budaya Bali-Lombok. Di mana kemaliq yang berartikan suci atau sakral yang harus dilaksanakan dalam bahasa Sasak, adalah sebuah budaya tentang aktivitas berbagi situs kemaliq antara penganut Hindu-Islam untuk melaksanakan ritual keagamaan masing-masing. Sedangkan perang topat adalah budaya dalam budaya kemaliq, di mana para penganut agama Hindu-Islam saling melempar ketupat kepada satu sama lain sebagai bentuk penghapusan luka masa lalu dan sebagai bagian dari upacara persembahan untuk meminta keberkahan dan perdamaian bagi seluruh pihak (Budiwanti, 2014).

Sejak abad ke-16 kedua budaya ini telah lama menjadi sumber dan pilar perdamaian di wilayah sekitar situs Kemaliq Lingsar. Terkhusus peran dari kedua budaya ini untuk mendamaikan luka peperangan masa lalu antara penganut Hindu Bali dan Islam Lombok (Budiwanti, 2022), sehingga nilai-nilai perdamaian yang terkandung di dalamnya sangat teruji dan stabil dari gangguan budaya lain, terbukti

dengan masih berjalannya secara sakral kedua budaya ini di sekitar wilayah Kemaliq Lingsar.

Berbeda dari banyak budaya damai lain, budaya kemaliq dan perang topat menciptakan perdamaian dari aktivitas yang dilakukan dalam rangkaian budayanya. Pada budaya kemaliq dengan aktivitas berbagi tempat sakral Pura Lingsar untuk kegiatan agama Islam dan Hindu, sedangkan pada perang topat adalah pengeluaran segala emosi negatif yang terpendam dengan menghempaskannya bersama topat (ketupat) kepada pihak lain. Artinya, selama ini aktivitas inti tidak berubah, nilai guna praktikal dari kedua budaya ini untuk menciptakan kondisi damai akan tetap kekal. Inilah yang menjadi alasan utama peneliti mengusulkan budaya ini menjadi budaya dominan dengan bantuan intervensi pemerintah.

Namun, agar sebuah budaya damai dapat mempertahankan nilai perdamaianya ini selagi melakukan dominasi kepada budaya lain, maka dominasinya harus dapat memancing kesukarelaan dan bukan pemaksaan. Di mana budaya ini perlu memiliki ruang *universalitas*, harus memberikan ruang agar masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda dapat bergabung dan berkontribusi. Budaya kemaliq dan perang topat memiliki ruang potensi untuk dapat menjadi budaya damai universal, terutama bila semua pihak mendukung pengembangan budaya ini menjadi budaya dominan.

Pertama, terkecuali serpihan budaya yang dibawa turis (Maćkowiak, 2015), tidak ada pengaruh nilai budaya bangsa barat (karena berdasarkan Hindu-Islam, dan Sasak-Bali) yang mempengaruhi kedua budaya ini (Alford, Broudy, Klaehn, MacLeod, & Zollmann, 2019; Wibowo, 2022). *Kedua*, keberhasilan perdamaian Hindu-Islam oleh kedua budaya ini bisa digunakan untuk meningkatkan *leverage* diplomasi Indonesia terkait *issue* perdamaian di kancah dunia. Di mana dunia akan membandingkan indonesia dengan India yang menganut Hindu-Islam masih berkonflik keras disana, dikarenakan belum menemukan jalan keluar yang dapat mempersatukan mereka, selain penguatan nilai nasionalisme (Ellwood-Lowe, Berner, Dunham, & Srinivasan, 2020).

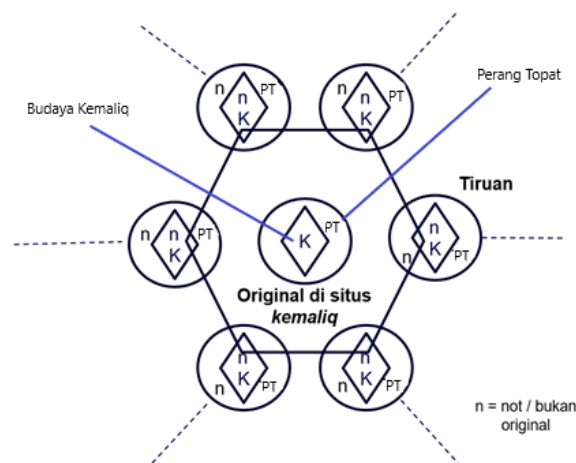
Ketiga, budaya ini dimiliki dan dibangun oleh Suku Sasak dan keturunan Bali, sehingga jika pemerintah mendukung kedua budaya ini sebagai budaya dominan, maka peneliti yakin di dalam internal NTB dukungan akan muncul dari Suku Sasak, dan dari luar Bali juga akan mendukung. *Keempat*, kedua budaya ini adalah hasil asimilasi dua pengaruh besar, Hindu-Islam dan Sasak-Bali. Terdapat pengalaman dan ilmu *balance of power* yang baik dalam pelestarian kedua budayaan ini, di mana mereka

yang melestarikan telah berpengalaman untuk mengendalikan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Terlihat dengan sebanyak dan seberbeda apapun versi cerita terkait Kemaliq Lingsar, tidak akan merusak budaya kemaliq dan perang topat (Dewi & Wirata, 2023). Artinya, sekalipun kedua budaya ini menjadi dominan, lebih kecil kemungkinan kutukan dari *lord acton* terkait *power* dapat terjadi pada kedua budaya ini daripada kebudayaan lainnya, bila sama-sama menjadi budaya dominan.

Kelima, pelaksanaan kegiatan yang ada dalam kedua budaya ini, peneliti yakini dapat replikasi dengan penyesuaian di luar Kemaliq Lingsar atau wilayah luar sekitarnya. Hal itu dapat menjadi sebagai kegiatan komunikasi dan doa bersama bagi perdamaian negeri atau semacamnya. Walaupun memang acara semacam ini telah mendapatkan kritik terkait masalah *aqidah* dalam Islam (Bimasakti, 2019), tetapi nilai damai dan sumbangsuhnya akan kedamaian yang berkelanjutan di masa depan juga tidak bisa dipungkiri.

Sedangkan terkait isi acara, yang direplikasi terkait budaya kemaliq, terkait tindakan atau kegiatan berbagi situs sakral (dalam budaya kemaliq) untuk melaksanakan ritual keagamaan masing-masing, serta kesakralan situs ini dapat diganti (pada replikasi) dengan berbagai situs bersejarah atau situs spesial dan strategis lainnya. Sedangkan pada perang topat, di luar upacara sakral yang diterapkan di awal dan berbagai persembahan yang disembahkan, budaya perang topat lebih condong kepada sebuah *entertainment activity* (kegiatan hiburan) yang menarik dan menyegarkan, tetapi memiliki nilai manfaat *peacebuilding* atau pembangun perdamaian yang tinggi, sehingga pada bagian perangnya (inti yang direplikasi) dapat dilaksanakan pada situs yang telah dipilih sebelumnya. Sebagai alternatif yang lebih aplikatif, peneliti juga menyarankan replikasi kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai acara atau kegiatan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dari wilayah. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi tetap mengedepankan pembagian satu ruang khusus untuk melaksanakan ibadah bersama dan dilanjut dengan aktivitas perang topat (atau yang serupa) untuk menghapuskan jarak perbedaan yang dimiliki.

Oleh karenanya, tidak ada batasan kuat selain terkait kesakralan situs kemaliq untuk dapat membuat kedua budaya ini dapat ditirukan atau direplikasi dalam bentuk perhelatan budaya yang sama (namun berbeda), setidaknya secara paralel. Atau dalam artian lain peniruan perhelatan kedua budaya ini (di tempat lain) sangat mungkin untuk dilakukan, terlebih jika pemerintah ikut berperan dalam perealisasiannya.



Gambar 3. Skema hubungan perhelatan budaya kemaliq dan perang topat original dengan perhelatan budaya paralel tiruan.

Keenam, sesuai dengan gambar 3, di mana terdapat ruang besar pemisah dan lingkup ruang internal (lingkaran) tersendiri, perhelatan budaya paralel (bila dilaksanakan) tidak akan terlalu penuh dengan ikatan seperti perhelatan original di kemaliq lingsar yang mengedepankan situs sakral kemaliq bagi umat Hindu-Islam, sehingga dalam perhelatan paralel bukan hanya Hindu-Islam yang dapat ikut, melainkan seluruh warga dengan berbagai latar belakang yang bersedia untuk ikut dalam perhelatan budaya paralel ini. Semua dapat ikut dalam perhelatan budaya paralel terlepas dari keragaman identitas yang mereka miliki, sehingga bisa sama-sama berbagi ruang yang ada pada *venue* pilihan untuk melaksanakan kesakralan ibadah masing-masing, dan mendapatkan manfaat damai penganut Hindu-Islam melalui pelaksanaan kemaliq. Setelahnya mereka akan menghapuskan perbedaan dan menjaga perdamaian melalui pengeluaran berbagai emosi negatif melalui perang topat yang menyenangkan.

Ketujuh, sesuai dengan alasan lima dan enam, perhelatan budaya paralel memiliki *benefit* (keuntungan) besar dengan risiko yang dapat dikendalikan, yang peneliti akan bahas pada gambar 6 menggunakan analisis SWOT. *Benefit* dan *cost* (biaya) dari penciptaan medium dan sarana yang cukup untuk merealisasikan perhelatan paralel pertama akan menjadikan budaya kemaliq dan budaya perang topat menjadi budaya yang jauh lebih besar, sehingga (setelah keberhasilannya) perhelatan budaya paralel pertama akan dapat berjalan mandiri untuk menciptakan perhelatan budaya paralel selanjutnya dengan berbagai pengaruh *spillover* yang dapat timbulkan. Jika pemerintah melakukan investasi pada satu perhelatan paralel, keberhasilan dari

perhelatan ini akan membangun perhelatan lain, sehingga pemerintah tak perlu lagi untuk mendanainya.

Peneliti yakin bahwa perhelatan paralel adalah salah satu bentuk investasi terbaik bagi pemerintah terkait budaya perdamaian di Lombok, terlebih karena perhelatan kedua budaya ini (tanpa pengembangan) telah cukup memberikan sumbangsih besar pada perekonomian warga sekitar (dengan berdagang di kerumunan) pula (Kadri, 2020). Tentu investasi yang dilakukan pemerintah dengan mengembangkan atau merealisasikan perhelatan budaya paralel ini akan menghasilkan *return* (hasil), yang tidak hanya berupa meningkatkan kedamaian dan keamanan wilayahnya dengan penerapan budaya ini, tetapi juga perluasan nilai manfaat sosial-ekonomi terkait perhelatan besar kedua yang akan terus membesar.

Pendapat ini peneliti dapatkan setelah melakukan analisa SWOT terhadap kemungkinan perealisasi perhelatan budaya paralel, yang dapat dilihat sebagaimana dalam Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Analisa SWOT pengembangan budaya kemaliq dan perang topat

Sesuai dengan gambar 4 di atas, bagian *strength* (kekuatan) berisikan banyak pendukung karena dengan melakukan perhelatan paralel budaya kemaliq dan perang topat jauh di luar wilayah Kemaliq Lingsar, maka perhelatan budaya paralel ini akan membawa angin segar bagi masyarakat, pemangku adat, dan guru religious bukan hanya dari latar belakang Hindu-Islam. Dengan adanya perhelatan budaya paralel ini, semua kini dapat ikut serta tanpa batasan latar belakang lagi, serta tiada lagi alasan jarak wilayah Kemaliq Lingsar yang jauh dari tempat mereka tinggal dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan manfaat besar dari melaksanakan perhelatan budaya kemaliq dan perang topat.

Analisa ini peneliti capai, sesuai alur pikir *expectancy-value theory* (teori harapan-nilai) dari Eccles & Wigfield (2020), di mana ekspektasi untuk dapat ikut serta dalam

perdamaian daerah mereka (yang pasti semua mau untuk melakukan) terlalu mudah untuk dicapai, yaitu hanya dengan *ability* (kemampuan) yang berbentuk kemauan untuk ikut serta, mereka sudah pasti mendapatkan *value* (nilai hasil), yaitu ikut serta dalam upaya perdamaian dan berbuat baik. Salah satu variabel penurunan motivasi ini adalah penolakan yang datang dari masyarakat konservatif pemilik asli kedua budaya yang melaksanakannya di Kemaliq Lingsar (*weakness* atau kelemahan). Sebab para konservatif ini akan mengaktifkan *loss aversion* (Sokol-Hessner & Rutledge, 2019), di mana mereka lebih merasa sakit karena budaya mereka ditiru hingga mereka merasa budaya mereka dicuri, daripada perasaan bahagia bahwa budaya mereka diadopsi oleh banyak orang dan bahkan didukung oleh pemerintah.

Penolakan dari para konservatif dalam analisa peneliti memiliki dua akar masalah yang memang harus diperhatikan, terutama tentu terkait dengan kesucian dan kesakralan dari kedua budaya yang akan jauh ternoda dengan berbagai budaya yang masuk dalam perhelatan budaya paralel secara asimilasi, yaitu interaksi antar budaya yang bersinggungan dan mempengaruhi masing-masing budaya mereka sendiri (Berry, 2019). Masuknya budaya lain pada perhelatan paralel ini juga menjadi kekhawatiran kedua, karena dengan masuk berbagai budaya, maka sangat memungkinkah bahwa perhelatan paralel (di suatu saat nanti) akan menjadi perhelatan yang jauh lebih besar dan ramai daripada perhelatan aslinya. Sebab budaya itu sendiri adalah makhluk hidup yang terus tumbuh dengan budaya lain melalui interaksi dominasi ataupun hanya sekadar asimilasi, di mana berbagai keburukan akan ditinggalkan dan berbagai nilai kebaikan akan terus menumpuk (Richerson & Boyd, 2008; Creanza & Feldman, 2017).

Oleh karenanya, *opportunity* (peluang) pada satu sisi jugalah menjadi *threat* (ancaman) dan disaat yang sama menjadi alasan kelemahan atau penolakan dari para konservatif. Meskipun demikian, bukan berarti masalah ini tidak memiliki preskripsi untuk menanggulangnya. Sebab seperti yang tampak pada gambar 5, di mana perhelatan budaya yang dilaksanakan di sekitar Kemaliq Lingsar akan tetap menjadi budaya original, dan perhelatan paralel akan tetap menjadi perhelatan tiruan, tak peduli sebesar apapun perhelatan mengembang di suatu hari nanti. Keadaan inilah yang dapat terus meredam pengaruh penolakan yang berakar dari kekhawatiran para konservatif, sebab meskipun originalitas tidak otomatis dapat menyimpulkan bahwa objek atau subjek itu adalah jauh lebih bagus ataupun jauh lebih jelek dari tiruannya, tetapi originalitas selalu mendapati persepsi baik dan terus dicari (dalam hal ini dilaksanakan) oleh masyarakat.

4. SIMPULAN

Dominasi sebuah budaya terhadap budaya lain akan menjadi *unpredictable factor* yang dapat menyumbang kebaikan ataupun keburukan di dalam masyarakat itu sendiri. Namun, bukan berarti dominasi sebuah budaya harus ditakutkan, sebab tanpa dukungan dari pihak manapun dominasi budaya oleh kelompok mayoritas itu sendiri tak terelakan. Oleh karenanya, perilaku dan peran pemerintah yang seperti menunggu pemenang atas seleksi alamiah. Sejarah dunia membuktikan bahwa *renaissance* adalah kunci kemajuan dari Eropa, di mana budaya terbaik digunakan sebagai dasar untuk dikembangkan menjadi budaya yang lebih matang di kemudian hari. Konflik terus terjadi akibat kemajuan itu sehingga Eropa terus terbelah sebagai akibatnya. Namun, bukan berarti kejadian dan tindakan yang mengawali *renaissance* itu salah, dan tidak harus dilakukan. Oleh karenanya, saran peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah untuk lebih mengenal budaya terbaik Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi pondasi *renaissance*, khususnya dalam mewujudkan perdamaian yang tangguh dan dapat direplikasi, seperti Kemaliq dan Perang Topat dari Lombok.

REFERENSI

- Alford, M., Broudy, D., Klaehn, J., MacLeod, A., & Zollmann, F. (2019). How the Western media support state terror-while millions die. *Ethical Space: The International Journal of Communication Ethics*, 16(4), 43-47.
- Aryawati, N. M., Wirawan, I. W., & Wirata, I. W. (2022). Komunikasi Cultural Resource Management Perang Topat Di Pura dan Kemaliq Lingsar. *Guna Sewaka*, 1(2), 23-34.
- Berry, J. W. (2019). *Acculturation: A personal journey across cultures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bimasakti, M. A. (2019). Doa Bersama Dalam Pandangan Islam. . *Jurnal Aqidah*, 2, 168-184.
- Budiwanti, E. (2014). Balinese minority versus Sasak majority: managing ethno-religious diversity and disputes in western Lombok. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 3(2), 233-250.
- Budiwanti, E. (2022). *When Local Meets Global: Religion, Ritual, And Contestation In Lombok*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Creanza, N. O., & Feldman, M. W. (2017). Cultural evolutionary theory: How culture

- evolves and why it matters. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114(30), 7782-7789.
- Dewi, N. L., & Wirata, I. W. (2023). Philosophy Of Ramayana In Kemaliq Vol. 1, No. 1. *ICOHIS: International Conference On Hindu Studies*, 104-112.
- Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2020). From expectancy-value theory to situated expectancy-value theory: A developmental, social cognitive, and sociocultural perspective on motivation. *Contemporary educational psychology* 61, 1-60.
- Ellwood-Lowe, M. E., Berner, C., Dunham, Y., & Srinivasan, M. (2020). Indian = Hindu? The Development of Nationalist Attitudes among Hindu and Muslim Children in India. *Child development*, 91(4), 1375-1394.
- Galtung, J. (2018). Violence, peace and peace research. *Organicom*, 15(28), 33-56.
- Institute for Economics & Peace. (2022). *Global Peace Index: Measuring Peace In A Complex World*. Sydney: Institute for Economics & Peace.
- Jeong, H. W. (2019). *The new agenda for peace research*. Oxford: Routledge.
- Kadri. (2020). Harmoni Komunikasi Lintas Agama Berbasis Ekonomidan Ritual: Studi Fenomenologi Pada Komunitas muslim Dan Hindu Di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat . *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (1), 1833.
- Lederach, J. P. (2015). *Little Book Of Conflict Transformation: Clear Articulation Of The Guiding Principles By A Pioneer In The Field*. New York: Simon and Schuster.
- Loh, D. M. (2018). Peaceful but stressful: the disturbance and endurance of norms in ASEAN. *Australian Journal of International Relations* vol 72:5, 385-402.
- Lykke, & F., A. (1997). Defining Military Strategy. *MILITARY REVIEW (January-February 1997)*, 185-186.
- Maćkowiak, A. (2015). International Tourism and Local Religious Traditions on Two Indonesian Islands. *Folia Turistica* Vol. 37, 85-98.
- Meiser, J. (2016). Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy. *Parameters* 46, no. 4.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage.
- Muluk, H., & Malik, I. (2009). Peace psychology of grassroots reconciliation: Lessons learned from the "Baku Bae" peace movement. *Peace psychology in Asia*, 85-103.
- Richerson, P. J., & Boyd, R. (2008). *Not by genes alone: How culture transformed human evolution*. Chicago, USA: University of Chicago press.
- Sirijintana, W. (2022). Putting ASEAN to Test: The Roles and Challenges of Resolving the Myanmar Political Crisis After the 2021 Coup. *Graduate Review of Political Science and Public Administration Journal* 1, no. 2, 1-16.

- Sokol-Hessner, P., & Rutledge, R. (2019). The psychological and neural basis of loss aversion. *Current Directions in Psychological Science*, 28(1), 20-27.
- Suhadah, S., Mulyana, D., Yusup, P. M., & Sjafirah, N. A. (2022). Suhadah, S., Mulyana, D., Yusup, P. M., & Sjafirah, N. A. (2022). Pilgrimage Sites as Magnets of Interfaith Tolerance: The Case of Kemaliq Lingsar in Indonesia. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 10(3). *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 10(3), 14-27.
- Wibowo, B. A. (2022). Education As A Form Of Resistance Ki Hadjar Dewantara Towards Occupation. *Proceeding Humanities: Teacher Training and Education*, 4(1), 22-28.
- Williams, A. (2019). *Political hegemony and social complexity: Mechanisms of power after Gramsci*. Berlin: Springer.
- Yamahata, C. (2022). Myanmar at a "Point of No Return": Unity Reborn Despite Junta's Terrorization. *Demystifying Myanmar's Transition and Political Crisis.*, 321-344.
- Yuniati, K. (2023). Komunikasi Ritual Berbasis Moderasi Beragama Dalam Ritual Perang Topat Dan Pujawali Pura Lingsar. *Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation* 2(1), 54-61.
- Zidni, Suhupawati, Rahmawati, B. F., & Hadi, M. S. (2021). Nilai-Nilai Sejarah Kemaliq Lingsar dan Peranannya Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Lingsar Lombok Barat. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 7(2), 108-121.

This page is intentionally left blank